
PELAPORAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI DI KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO)

Shinta W. Abdjul^{1*} dan Harun Blongkod²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: blongkod@ung.ac.id

Diterima: April 2026; Direvisi: Juli 2026; Dipublikasikan: Agustus 2026

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze how reporting mechanisms and supervisory functions influence the administration of village budgets within Telaga District, Gorontalo Regency. While the effective handling of these funds is pivotal for bolstering local prosperity and ensuring governmental integrity, a noticeable disconnect persists. Current evidence suggests that the practical application of oversight and reporting standards has yet to align with the idealized regulatory framework, leaving significant room for improvement. This study employed a quantitative survey method, distributing questionnaires to 132 respondents selected via purposive sampling. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) via AMOS and SPSS software. The results indicate that reporting has no significant impact on village fund management, whereas oversight demonstrates a positive and significant influence. These findings highlight that high-quality oversight is a key factor in improving the quality of village fund management, while also strengthening transparency and accountability.

Keywords: Reporting, Supervision, Village Fund Management

ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini berkaitan dengan pemeriksaan dampak pelaporan serta fungsi pengawasan bagi tata kelola dana desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pengelolaan dana desa memainkan peran strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kerangka ideal pelaporan dan pengawasan dengan implementasinya di lapangan, yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif, dengan mendistribusikan kuesioner kepada 132 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Pengolahan data dalam riset ini dioperasikan melalui metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan dukungan aplikasi SPSS dan AMOS. Berdasarkan temuan yang diperoleh, aktivitas pelaporan terbukti tidak memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas manajemen dana desa. Sebaliknya, fungsi pengawasan memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Hal ini menegaskan bahwa supervisi yang ketat dan kompeten menjadi elemen krusial dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan desa, yang pada akhirnya memicu peningkatan aspek akuntabilitas serta transparansi.

Kata Kunci: Pelaporan, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta unsur masyarakat melalui musyawarah desa sehingga pengelolaannya dituntut untuk berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Hulu et al., 2018).

Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik sosial dan kebutuhan pembangunan yang beragam sehingga dana desa menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa, khususnya yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan dan fungsi pengawasan yang belum berjalan optimal di tingkat desa.

Pelaporan keuangan merupakan proses penyusunan dan penyajian informasi keuangan secara sistematis yang bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan akuntabilitas pemerintah desa. (Rahmawan & Akbar, 2024) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas serta meminimalkan penyalahgunaan dana desa, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis digital seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sehingga berdampak pada keterlambatan dan ketidaktepatan data pelaporan.

Selain pelaporan, pengawasan merupakan proses evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui perbandingan realisasi di lapangan (Aprilia dan Shauki, 2020; Kholik, 2024). (Jumarni & Zulfikar, 2025) menyatakan bahwa efektivitas pengawasan di tingkat desa masih belum optimal karena rendahnya keterlibatan masyarakat serta masih dominannya pengawasan administratif dibandingkan pengawasan partisipatif.

Hasil pengamatan di Kecamatan Telaga menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan keuangan masih mengalami berbagai hambatan, khususnya terkait keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes versi terbaru sehingga penyusunan laporan lebih banyak dibebankan kepada bendahara desa dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan realisasi kegiatan di lapangan. Selanjutnya pada pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sehingga masyarakat lebih banyak berperan sebagai pengawas informal melalui media sosial ketika menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan, terutama pada pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat keterbatasan pada penelitian terdahulu, karena sebagian besar studi sebelumnya hanya mengkaji pelaporan keuangan dan pengawasan secara terpisah serta dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda, sehingga penelitian yang menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan dalam pengelolaan dana desa masih terbatas. Selain itu, terdapat kesenjangan empiris di Kecamatan Telaga yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam pengelolaan sistem pelaporan digital serta lemahnya fungsi pengawasan formal oleh BPD menyebabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa belum terlaksana secara optimal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh pelaporan keuangan dan pengawasan secara simultan terhadap pengelolaan dana desa dalam konteks empiris lokal di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menelaah kedua variabel tersebut secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan

keduanya ke dalam satu model analisis sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam karyanya yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*". Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu bentuk kontrak di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk menjalankan tugas tertentu atas namanya, termasuk pelimpahan sebagian hak dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika masing-masing pihak berusaha mengoptimalkan kepentingan sendiri, sehingga dapat terjadi perbedaan antara tujuan agen dan kepentingan prinsipal. Situasi ini juga dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi yang menyebabkan prinsipal tidak memperoleh informasi selengkap agen. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pengendalian melalui pemberian insentif yang sesuai serta pengawasan yang efektif agar agen dapat bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Saputra & Afrizalmi, n.d.).

Pelaporan

Pelaporan keuangan merupakan fase penutup dalam rangkaian proses akuntansi yang berfungsi menyajikan keadaan finansial suatu entitas pada periode tertentu. Informasi yang termuat di dalam laporan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan data yang relevan dan menyeluruh bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari dalam organisasi maupun dari luar. Dengan demikian, informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi utama dalam merumuskan keputusan yang lebih akurat dan terukur. Mengacu pada Pernyataan No. 1 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Financial Accounting Standards Board, laporan keuangan diartikan sebagai penyajian informasi keuangan secara terstruktur yang bertujuan untuk memperlihatkan posisi keuangan serta kinerja suatu entitas.

Mamduh M. Hanafi (2018) memaparkan bahwa pelaporan keuangan berfungsi sebagai sarana bagi manajemen untuk mengomunikasikan kondisi ekonomi organisasi sekaligus sebagai wujud akuntabilitas atas capaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (2015) menggarisbawahi bahwa laporan keuangan merupakan elemen inti dari sistem pelaporan tersebut. Dokumentasi ini mencakup serangkaian instrumen vital, mulai dari laporan posisi keuangan dan laba rugi, hingga laporan arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan kaki yang menyediakan uraian mendalam terkait data yang ditampilkan. Dengan demikian, penyusunan laporan yang sesuai standar dan mencakup seluruh komponen tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi keuangan, aktivitas operasional, dan kinerja entitas, sekaligus meningkatkan tingkat keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan (Suharsono, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaporan keuangan memiliki kaitan dengan tingkat akuntabilitas dalam aspek manajemen dana desa ini tercermin dari penyusunan laporan yang terstruktur dan menyeluruh, sehingga mampu menciptakan keterbukaan sekaligus memperlancar kegiatan monitoring. Studi yang dilakukan oleh (Nufus et al., 2023) menunjukkan bahwa mutu laporan keuangan yang prima berperan penting dalam memupuk kepercayaan publik, mengingat data yang disajikan lebih kredibel dan transparan. Akan tetapi, (Muhammad & Wahyuni, 2024) menemukan fakta yang kontradiktif; mereka berpendapat bahwa pelaporan keuangan belum memberikan dampak nyata pada akuntabilitas.

Kendala utamanya terletak pada standar penyusunan yang masih rendah serta kurangnya kompetensi perangkat desa dalam memahami regulasi pelaporan yang ada.

Pengawasan

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa selaras dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, disiplin anggaran, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari anggaran negara, dana desa tunduk pada pengawasan berjenjang oleh Badan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Merujuk pada regulasi yang tertuang dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020, proses ini mengintegrasikan peran kementerian terkait di tingkat pusat, seperti Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan Kemenkeu, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk pengawasan umum, sedangkan bupati/walikota mendelegasikan pengawasan langsung kepada kepala distrik dan inspektorat daerah, dengan pengawasan eksternal. Merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam UU No. 15 Tahun 2004, otoritas pemeriksaan dan supervisi keuangan berada di bawah wewenang BPK serta BPKP.

Inspektorat daerah memainkan peran strategis yang melampaui fungsi audit, mencakup peninjauan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan (Thomas & Kusmiadi, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal memperkuat hubungan antara pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan kualitas laporan keuangan desa, sehingga efektivitas yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas laporan (Agustina & Raharjo, 2025).

Pengelolaan Dana Desa

Manajemen anggaran desa melibatkan tahapan yang menyeluruh, mulai dari fase penyusunan rencana dan realisasi hingga tahap pembukuan, publikasi laporan, serta bentuk akuntabilitas dan supervisi terhadap semua sumber daya finansial milik desa, sebagaimana dijelaskan oleh Ratmono dan Sholihin (2023). Dalam konteks tata kelola desa, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan berbasis kas, sehingga transaksi dicatat segera setelah penerimaan atau pengeluaran uang tunai melalui rekening bank khusus desa (Agustina & Raharjo, 2025). Kepala desa memikul tanggung jawab penuh sebagai pemimpin yang berwenang, meskipun sebagian dari mandatnya didelegasikan kepada staf pendukung struktur operasional ini melibatkan elemen-elemen kunci seperti sekretaris desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan sebagai pengelola teknis. Berdasarkan regulasi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, seluruh rangkaian tata kelola keuangan desa wajib menjunjung tinggi asas akuntabilitas, keterbukaan, keterlibatan publik, serta ketertiban dan kedisiplinan anggaran. Dana desa pada dasarnya didefinisikan sebagai kumpulan hak dan kewajiban keuangan desa, yang mencakup berbagai aset—baik yang likuid maupun tidak likuid—untuk mendukung realisasi hak-hak tersebut dan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut (Rompas et al., 2025).

Hipotesis

Pengaruh Pelaporan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, sistem pelaporan berperan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Enjelina & Meihendri, 2024) juga menegaskan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H2 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dihasilkan. Namun berbeda dengan penelitian (Amelia et al., 2025) yang

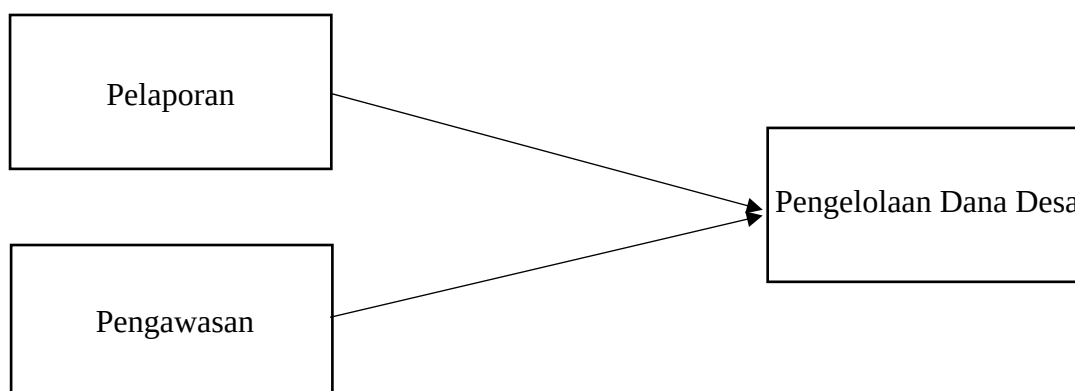
menunjukkan hasil yang berbeda, di mana sistem pelaporan dinyatakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa sehingga H3 ditolak. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyusunan laporan yang hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pertanggungjawaban maupun dasar evaluasi untuk melakukan tindak lanjut perbaikan.

Hipotesis 1 (H1): Pelaporan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan dana desa

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Penelitian (Baiana et al., 2024) pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa sehingga hipotesis pertama ditolak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa. Akan tetapi, penelitian dari (Daulay, 2024) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pengawasan dinilai memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pengawasan yang berjalan dengan baik dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pencatatan keuangan desa. Selain itu pengawasan yang efektif juga mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hipotesis 2 (H2): Pengawasan berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan Dana Desa



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian verifikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer digunakan sebagai sumber utama, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020).

Penerapan teknik purposive sampling dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik responden, yaitu masyarakat serta aparat yang berada di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, responden dipilih yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana desa di wilayah tersebut, sehingga diperoleh total 132 responden sebagai sampel penelitian.

Variabel-variabel yang teliti dalam penelitian ini meliputi pelaporan (X1), pengawasan (X2), dan pengelolaan dana desa (Y), yang akan dibahas secara mendalam pada Bab 4. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Menurut (Ghozali, 2016), SEM merupakan kombinasi dari dua metode statistik, yaitu analisis faktor dari bidang psikologi dan psikometri, serta pemodelan persamaan simultan dari ekonometrika. Pendekatan

ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, khususnya pengaruh pelaporan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut menyajikan hasil analisis normalitas pada variabel X1 yang diukur menggunakan nilai minimum, maksimum, skewness, critical ratio (c.r.) skewness, kurtosis, serta critical ratio (c.r.) kurtosis pada masing-masing indikator penelitian. Analisis tersebut dilakukan untuk mengevaluasi karakteristik distribusi data sehingga dapat diketahui kelayakan data dalam tahapan pengujian selanjutnya. Selain itu, tabel juga menampilkan hasil uji normalitas multivariat yang digunakan untuk menilai distribusi data penelitian secara keseluruhan.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Variabel Pelaporan X₁

Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Skewness	c.r. (Skew)	Kurtosis	c.r. (Kurtosis)
X1.6	1	5	-1,569	-7,36	2,667	6,254
X1.5	1	5	-1,471	-6,898	3,296	7,73
X1.4	1	5	-1,445	-6,777	3,285	7,703
X1.3	1	5	-1,569	-7,36	3,429	8,041
X1.2	1	5	-1,407	-6,597	3,654	8,57
X1.1	1	5	-1,669	-7,828	3,846	9,019
Multivariate					56,986	33,41

Sumber data AMOS SEM data diolah

Berdasarkan temuan uji normalitas, data pada variabel manajemen keuangan daerah terdeteksi tidak terdistribusi secara normal. Hal ini disebabkan oleh skor C.R. *skewness* univariat pada seluruh variabel yang berada di luar koridor $-2,58 < z < 2,58$. Meskipun nilai C.R. multivariat sebesar 33,41 masih masuk dalam batas toleransi $2,58 < z < 8,9$, secara keseluruhan data tetap dikategorikan tidak normal, baik secara univariat maupun multivariat, untuk digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Variabel Pengawasan X₂

Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Skewness	c.r. (Skew)	Kurtosis	c.r. (Kurtosis)
X2.6	1	5	-1,419	-6,655	2,596	6,089
X2.5	1	5	-1,395	-6,542	3,412	8,002
X2.4	1	5	-1,714	-8,041	4,823	11,311
X2.3	1	5	-1,444	-6,775	4,048	9,494
X2.2	1	5	-1,56	-7,319	3,413	8,004
X2.1	1	5	-1,56	-7,318	3,226	7,565
Multivariate					48,996	28,727

Sumber data AMOS SEM data diolah

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data untuk variabel-variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan distribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai koefisien kemiringan univariat (C.R.) untuk semua variabel, yang melebihi ambang batas kritis, yaitu $-8,041 > z > -6,542$. Selain itu, nilai C.R. multivariat mencapai 28,727, yang

berada dalam rentang $48,996 > z > 2,58$. Oleh karena itu, data dalam analisis ini tidak mengikuti pola distribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Variabel Pengelolaan Dana Desa Y

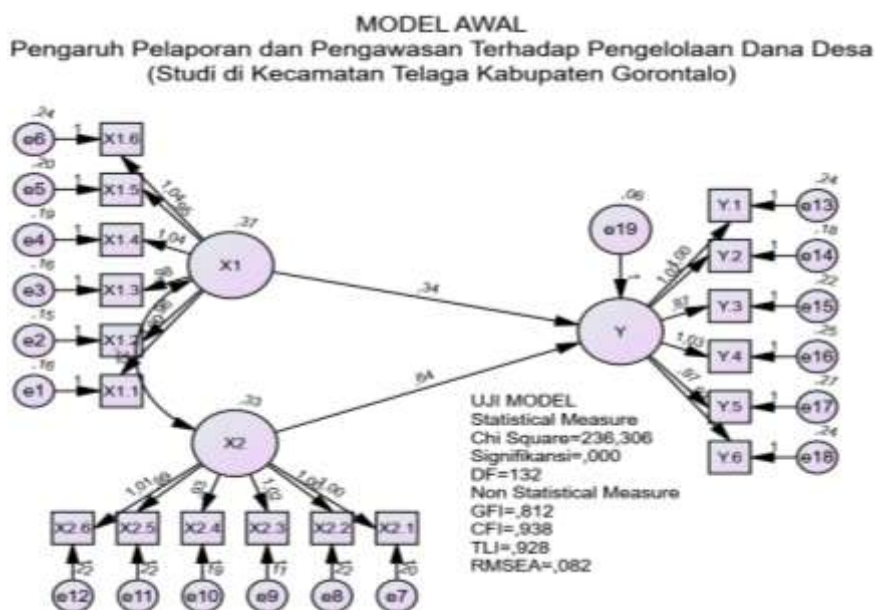
Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Skewness	c.r. (Skew)	Kurtosis	c.r. (Kurtosis)
Y.6	1	5	-1,559	-7,313	3,879	9,098
Y.5	1	5	-1,602	-7,516	4,083	9,575
Y.4	1	5	-1,373	-6,44	2,703	6,338
Y.3	1	5	-1,48	-6,944	3,296	7,729
Y.2	1	5	-1,363	-6,395	2,93	6,872
Y.1	1	5	-1,057	-4,957	1,938	4,544
Multivariate					51,958	30,463

Sumber data AMOS SEM data diolah

Uji normalitas menunjukkan bahwa data untuk variabel-variabel manajemen keuangan lokal tidak memenuhi kriteria distribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai kemiringan C.R. univariat untuk semua variabel, yang melebihi ambang batas standar, yaitu $-7,516 > z > -4,957$. Selain itu, nilai C.R. multivariat adalah 30,463, yang masih berada dalam rentang $51,958 > z > 2,58$. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data tidak menunjukkan pola normal, baik secara univariat maupun pada level multivariat.

Pengujian Model Pengukuran Dengan SEM

Populasi sasaran dalam penelitian ini mencakup warga masyarakat di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Untuk menghimpun informasi yang diperlukan, peneliti menerapkan metode survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner dengan penerapan teknik purposive sampling, sehingga terpilih sebanyak 132 responden sebagai sampel penelitian. Jumlah tersebut telah memenuhi kriteria yang disarankan untuk analisis Structural Equation Modeling (SEM) menurut Hariyono (2016).



Sumber: Data di olah dengan amos SEM

Gambar 1.1 Hasil Analisis Structure Equation Modelling Tahap Awal

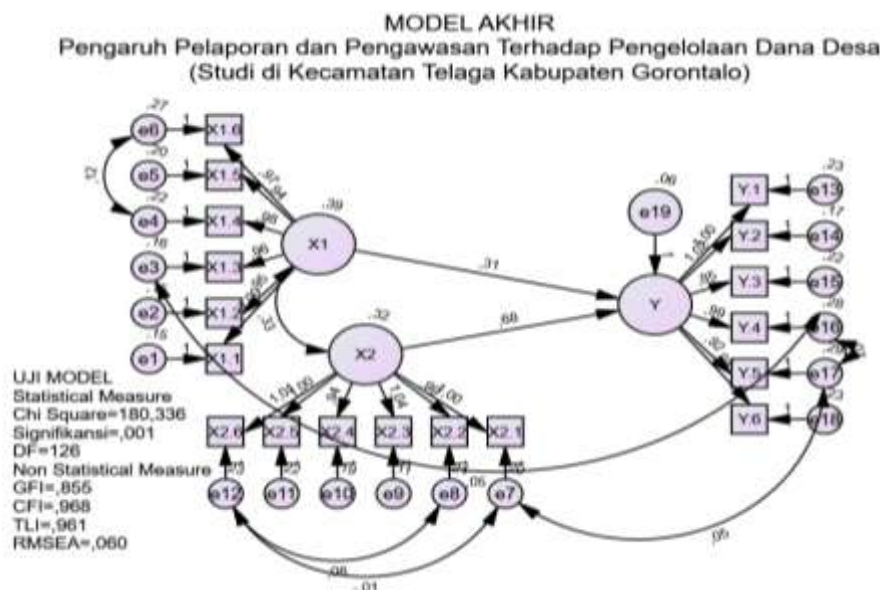
valuasi hasil pengujian model konstruk didasarkan pada Goodness of Fit (GFI), beberapa indikator model, dan ambang batas kritis untuk menilai kesesuaian model dengan data penelitian. Tabel berikut merangkum temuan dari pengujian tersebut:

Tabel 4 Evaluasi GFI Model (Uji Tahap Awal)

Kriteria	Cut-Off Value	Hasil Model	Evaluasi Model
Chi-square	Diharapkan kecil	236,306	<i>Good Fit</i>
Probability	$\leq 0,05$	$\leq 0,000$	<i>Good Fit</i>
CMIN/DF	$\leq 3,00$	1,79	<i>Good Fit</i>
IFI	$\geq 0,90$	0,939	<i>Good Fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	0,938	<i>Good Fit</i>
TLI	$\geq 0,95$	0,928	<i>Not Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,082	<i>Good Fit</i>

Sumber: olah data peneliti

Tabel 4 menunjukkan bahwa model belum memenuhi kriteria kelayakan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai dengan batas yang ditentukan, seperti nilai TLI sebesar 0,928 yang berada pada kategori kurang baik serta RMSEA sebesar 0,082 yang termasuk dalam kategori marginal. Namun demikian, beberapa ukuran kesesuaian model lainnya, seperti Chi-square, Probability, CMIN/DF, IFI, dan CFI telah memenuhi standar yang disyaratkan. Berdasarkan nilai modification indices, selanjutnya dilakukan penyesuaian model untuk meningkatkan kecocokan dan validitas dalam pengujian hipotesis. Proses modifikasi dilakukan dengan mengkorelasikan beberapa variabel tertentu, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: amos SEM digunakan untuk mengelola data

Gambar 1.2 Hasil tahap akhir Analisis *Structure Equation Modelling*

Setelah dilakukan modifikasi dengan mengkorelasikan variabel X1, X2, dan Y serta error term e1 hingga e19, maka hasil akhir pengujian Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk keseluruhan model diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil GFI Overal Model (Uji Tahap Akhir)

Parameter Uji	Batas Kelayakan (Cut-Off)	Angka Estimasi	Status Model
<i>Chi-square</i>	Nilai rendah diharapkan	180,336	<i>Good Fit</i>
<i>Probability</i>	$\leq 0,05$	$\leq 0,001$	<i>Good Fit</i>
CMIN/DF	$\leq 3,00$	1,431	<i>Good Fit</i>
IFI	$\geq 0,90$	0,968	<i>Good Fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	0,968	<i>Good Fit</i>
TLI	$\geq 0,95$	0,961	<i>Good Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,06	<i>Good Fit</i>

Sumber: olah data peneliti

Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel model telah memenuhi kriteria kesesuaian model yang ditetapkan. Karena semua indikator telah terpenuhi, analisis selanjutnya akan menyajikan koefisien regresi beserta rasio kritis untuk setiap variabel.

Pembahasan

Tahap berikutnya adalah pengujian hipotesis untuk memvalidasi proposisi yang telah diajukan sebelumnya. Evaluasi ini bertumpu pada skor *Critical Ratio* (C.R.) dari bobot regresi pada model lengkap₄, yang mencakup pengujian pada kelompok 1 maupun kelompok 2 (model *default*). Sebuah hipotesis dinyatakan terdukung apabila nilai C.R. lebih besar dari 1,660 atau nilai signifikansi (P) berada di bawah ambang batas 0,05, yang berimplikasi pada penolakan H0.

Tabel 6 Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Variabel			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y	<---	X1	0,309	0,243	1,271	0,204	par_17
Y	<---	X2	0,68	0,277	2,45	0,014	par_18

Sumber: olah data peneliti

Pengaruh Pelaporan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data pada Tabel 6, hipotesis pertama (H1) dinyatakan tidak terdukung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai C.R. sebesar 1,271 yang berada di bawah nilai kritis 1,660, serta nilai signifikansi (p) sebesar 0,204 yang lebih besar dari nilai 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pelaporan terhadap pengelolaan dana desa belum dapat dibuktikan secara empiris. Berdasarkan hasil pengamatan pada objek penelitian, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan laporan keuangan desa belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa apabila tidak didukung oleh kompetensi aparatur desa, keterbukaan informasi, serta pengendalian internal yang memadai.

Dalam perspektif teori akuntabilitas, pelaporan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal, karena pelaporan yang masih bersifat administratif belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas tidak hanya bergantung pada aspek pelaporan, tetapi juga memerlukan dukungan sistem pengawasan yang efektif serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perbedaan hasil ini juga dipengaruhi oleh karakteristik

objek penelitian, dimana desa yang menjadi lokasi penelitian memiliki kondisi tata kelola dan kesiapan administrasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Syadeli, 2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu (Khoirina & Widaryanti, 2023) juga mengemukakan bahwa akses terhadap laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada karakteristik objek penelitian, khususnya terkait kondisi tata kelola, kapasitas aparatur, serta sistem pengawasan yang diterapkan.

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data pada Tabel 6, hipotesis ke dua (H2) dinyatakan terdukung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai C.R. sebesar 2,450 yang lebih besar dari 1,660 serta nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa telah tercapai. Pengawasan terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait mampu meningkatkan kedisiplinan aparatur desa dalam penggunaan anggaran serta memastikan program pembangunan terlaksana sesuai perencanaan.

Secara konseptual, teori akuntabilitas menjelaskan bahwa pengawasan merupakan mekanisme kontrol utama untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan menjadi komponen penting dalam memperkuat penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung oleh konsep manajemen Terry (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajerial yang penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif (Wijayanti & Wicaksana, 2023).

Penelitian ini mendukung penelitian (Making & Handayani, 2021) serta (Hidayatun et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian (Sugiharti & Hariani, 2021) yang mengemukakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan objek penelitian, termasuk menunjukkan bahwa hasil penelitian dipengaruhi oleh karakteristik objek penelitian, termasuk sistem pengawasan, kualitas aparatur desa, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi di masing-masing wilayah.

Dalam tataran implementasi, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaan dana desa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Bagi pemerintahan kecamatan, temuan ini dapat digunakan sebagai dasar penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemerintah desa. Sementara itu, bagi pemerintah kabupaten, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta penguatan sistem pengawasan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dana desa dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan lebih optimal apabila didukung oleh sinergi antara kualitas pelaporan, efektivitas pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan secara profesional.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pelaporan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten

Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di wilayah tersebut lebih dipengaruhi oleh aktivitas fungsi pengawasan dibandingkan dengan pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem pelaporan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi pengawasan diterapkan secara efektif dalam menjaga keteraturan penggunaan anggaran, memastikan kepatuhan regulasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, pelaporan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja karena masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, sehingga peningkatan kualitas pengelolaan dana desa akan lebih optimal apabila didukung oleh penguataj fungsi pengawasan yang berkesinambungan serta optimalisasi pelaporan agar dapat berperan lebih substantif dalam evaluasi maupun pengambilan keputusan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada wilayah penelitian yang hanya mencakup desa-desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik pemerintahan desa yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel utama, yaitu pelaporan dan pengawasan, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi pengelolaan dana desa, seperti kompetensi aparatur desa, tingkat transparansi, serta sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan memiliki peran yang paling dominan dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan secara konsisten, baik internal maupun eksternal, serta meningkatkan kualitas pelaporan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan lokasi penelitian, menambah variabel lain yang relevan, serta menggunakan indikator pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Raharjo, T. H. (2025). *Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa Di Kecamatan Blora dengan Sistem Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi*. 6(3), 454–465. <https://doi.org/10.15294/baej.v6i3.25148>
- Amelia, L., Ma'ruf, M. H., & Suprihati. (2025). *Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Tanon Kabuapten*. 2(4), 28–36.
- Baiena, L., Hariyanti, D., & Usmany, P. (2024). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Mediasi (Studi Empiris Pada Negeri Administratif Gale-Gale Kabupaten Maluku Tengah)*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 6232–6246.
- Daulay, Z. R. (2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*.
- Enjelina, H., & Meihendri. (2024). *Pengaruh transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. *April*, 1–3.
- Ghozali, I. (2016). *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayatun, D. A. N., Fatimah, A. S., & Dicksan, I. (2024). *Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Ilmiah Koordinasi*, 3(01), 37–42.

- <https://jurnal.stiaypptpriatim.ac.id/index.php/koordinasi/article/view/147>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 10(1), 146–154.
- Jumarni, & Zulfikar, A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(2), 767–787.
- Khoirina, A., & Widaryanti, W. (2023). Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(02), 196–210. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i02.824>
- Kholik, K. (2024). Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4803–4811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 11–18.
- Muhammad, N., & Wahyuni, F. (2024). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 2(2), 59–72.
- Nufus, F., Siswadi, U., & La Tansa Mashiro Rangkasbitung, U. (2023). *Usep dan Firmansyah/Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi*. 63–70.
- Rahmawan, F., & Akbar, F. S. (2024). Implikasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Dengan Pelaporan Yang Transparan Dan Komitmen Dalam Berorganisas. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Rompas, Y. F., Walandouw, S. K., & Lintong, D. N. (2025). Analisis pelaporan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Desa Wuwuk, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 625–635. <https://doi.org/10.58784/rapi.414>
- Saputra, E., & Afrizalmi, J. (n.d.). *The Relevance of Agency Theory in Modern Economics and Management : A Conceptual Analysis and Organizational Implications Relevansi Teori Agensi dalam Ekonomi dan Manajemen Modern : Analisis Konseptual dan Implikasi Organisasional*.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); 1st ed.)*. Alfabeta CV.
- Suharsono, R. S. (2022). Analisis Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelaporan Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 140–158. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i2.4966>
- Syadeli, M. (2021). Determinan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Transparansi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 2622–0946.
- Thomas, S. F., & Kusmiadi, M. E. (2025). Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 401–407.
- Wijayanti, N., & Wicaksana, F. A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. 3, 30–43. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.202>